

**KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Muhammad Farras

NIT.21303799

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study aims to analyze public satisfaction with the implementation of electronic certificates at the Bogor I District Land Office. The background of this study is based on the transformation of land services from conventional to digital through the electronic certificate program designed by the Ministry of ATR/BPN and there is also a rating on the Google Maps application of 3.2 out of 5 for service, and there has not been any previous research. The research method used is a descriptive quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 459 respondents who use the service. Data analysis was carried out descriptively quantitatively by calculating the average percentage of answer scores from each indicator used and categorizing them. The results of the study show that overall the public feels very satisfied with the implementation of electronic certificates with an assessment category of "very satisfied". The indicators that most influence public satisfaction are simplicity (4.34), openness (4.33), affordability (4.31), and security (4.27). These indicators are based on 4 principles in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 (PP No. 24/1997). This indicates that the implementation of electronic certificates at the Bogor Regency Land Office I has succeeded in providing high satisfaction to the public. For the next step to maintain and improve public satisfaction, the Bogor Regency Land Office I conducts continuous monitoring with a short quarterly survey to detect changes in scores and respond quickly to decreases in satisfaction, and digital literacy which combines officer training with digital literacy socialization programs to narrow the gap between age groups and education, and benchmarking by comparing these scores with other land offices to set improvement targets.

Keywords : Public Satisfaction, Land Office, Electronic Certificate

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBERAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teoritis	13
1. Kepuasan Masyarakat	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat	15
3. Transformasi Digital.....	16
4. Sertifikat Elektronik	18
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24

A.	Format Penelitian	24
B.	Lokasi Penelitian.....	24
C.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	25
D.	Populasi dan Sampel	26
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
F.	Analisis Data	29
	BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A.	Gambaran Umum Kabupaten Bogor.....	33
B.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.....	35
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A.	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sertifikat Elektronik.....	39
1.	Deskripsi Penelitian	39
2.	Teknik Pengolahan Data	44
3.	Analisis dan Pembahasan.....	46
4.	Rekapitalisasi Dan Hasil Analisis Pembahasan	50
B.	Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat dalam Penerapan Sertifikat Elektronik	54
1.	Kesederhanaan.....	54
2.	Keamanan.....	55
3.	Keterjangkauan	55
4.	Keterbukaan	56
5.	Sintesis Perbandingan dan Prioritas Tindakan	56
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59
	DAFTAR PUSAKA.....	60
	LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, di mana pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan berfungsi sebagai jaminan hukum (Apriani & Bur, 2020). Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian. Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (PP No. 24/1997) menyebutkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud karena Sertifikat mencakup informasi mengenai bidang tanah, baik dari segi data fisik maupun data yuridis, yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Selain itu, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menegaskan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan sah secara hukum.

Sejak pertama kali diterbitkan hingga saat ini, Sertifikat tanah sebagai dokumen resmi hasil pendaftaran tanah masih dikeluarkan dalam bentuk cetak atau analog (Mujiburohman, 2021). Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sertifikat tanah dapat dialihkan ke dalam format elektronik tanpa mengurangi keabsahan hukumnya. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18/2021) mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa proses pendaftaran tanah dapat diselenggarakan secara digital, di mana hasil akhirnya berupa data, informasi, atau dokumen elektronik yang sah secara hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi di berbagai bidang, termasuk sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut memanfaatkan kemajuan ini dengan menyediakan layanan pertanahan berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses masyarakat (Masri, 2023). Melalui sistem layanan elektronik, masyarakat dapat memperoleh informasi pertanahan secara cepat dan mudah, termasuk verifikasi data fisik maupun yuridis sertifikat tanah, serta akses terhadap informasi lain yang tersimpan dalam sistem basis data (Sapardiyono & Pinuji, 2022). Komitmen ATR/BPN dalam penerapan teknologi ini telah dimulai sejak tahun 1997 melalui program Land Office Computerization (LOC), yang kemudian berkembang menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2001. Perkembangan sistem ini terus berlanjut, dari KKP-Desktop menjadi Geo-KKP, dan akhirnya pada tahun 2015 beralih menjadi sistem berbasis web yang dikenal sebagai KKP-Web (Adinegoro, 2023).

Sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan beragam layanan elektronik yang mencakup aspek-aspek penting dalam administrasi pertanahan. Layanan tersebut meliputi pengurusan Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertifikat, serta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Di samping itu, layanan digital ini juga menyediakan akses terhadap informasi data tekstual dan grafis, zona nilai tanah (ZNT), titik koordinat, serta paket data dari Global Navigation Satellite System (GNSS) dan sistem referensi CORS (Continuously Operating Reference System). Informasi lainnya yang turut tersedia mencakup riwayat kepemilikan tanah, histori tanah, peta pertanahan, dan data tata ruang (Prasetyo, D. B., 2023).

Sebagai bagian dari agenda modernisasi layanan pertanahan, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN menginisiasi perubahan bentuk sertifikat tanah dari format cetak menjadi digital. Inovasi ini secara resmi diperkenalkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,

dalam acara peluncuran di Istana Negara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Kebijakan awal terkait penerapan sertifikat elektronik diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Namun, regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai penerbitan dokumen elektronik dalam proses pendaftaran tanah.

Walaupun sertifikat elektronik (sertifikat-el) telah resmi diperkenalkan, implementasinya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan bertahap. Sesuai dengan pernyataan Menteri ATR/BPN, tahap awal pelaksanaannya difokuskan pada sertifikasi aset milik negara dan daerah, badan hukum, BUMN, tempat ibadah, serta masyarakat di dua belas kabupaten/kota yang telah memiliki kelengkapan data (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Setelah lancar penerapan tersebut dilanjutkan dengan penerapan layanan lainnya untuk seluruh wilayah indonesia (Alimuddin, 2021).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I merupakan salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Permen ATR/KBPN No. 3/2023) tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah mulai tanggal 22 Juli 2024. Meskipun secara formal Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan sertifikat elektronik, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan masih beragam.

Berdasarkan data yang ditampilkan di platform Google Maps, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I memperoleh rating sebesar 3,2 dari skala 5, dengan ulasan terakhir yang tercatat berasal dari dua tahun yang lalu. Rating ini mencerminkan adanya persepsi publik di nilai cukup memuaskan (Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor - Google Maps, n.d.). Adapun terdapat pada jurnal terdapat bahwa kualitas pelayanan dan pendaftaran tanah

pertama secara keseluruhan di nilai tidak memuaskan (Hermawan, W., Hakim, D. B., & Hutagaol, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikat elektronik di Kabupaten Bogor I.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikat elektronik?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam penerapan sertifikat elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam penggunaan sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian kebijakan publik dan administrasi pertanahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam meningkatkan layanan sertifikat elektronik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan terhadap 459 responden di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Sertifikat Elektronik

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa sangat puas terhadap implementasi sertifikat elektronik. Hal ini terlihat dari rata-rata skor seluruh indikator yang berada pada kategori “Sangat Puas”. Skor rata-rata masing-masing indikator adalah:

- Kesederhanaan: 4,34
- Keamanan: 4,27
- Keterjangkauan: 4,31
- Keterbukaan: 4,33

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam bentuk sertifikat elektronik telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap sertifikat elektronik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat

Keempat indikator yang diteliti yaitu kesederhanaan, keamanan, keterjangkauan, dan keterbukaan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata setiap indikator yang menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dengan kata lain, jika salah satu dari indikator tersebut mengalami penurunan kualitas, maka kepuasan masyarakat juga akan terpengaruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diharapkan dapat mempertahankan kinerja layanan yang telah memberikan kepuasan tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam hal kesederhanaan dan keterbukaan proses pelayanan.
2. Meskipun kepuasan tergolong sangat baik, peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik perlu terus dilakukan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami alur dan manfaat sertifikat elektronik dengan lebih baik.
3. Pengembangan sistem digital yang lebih ramah pengguna dan adaptif terhadap masyarakat dengan latar belakang pendidikan atau usia yang beragam juga perlu diperhatikan agar pelayanan semakin inklusif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti aspek lain seperti efektivitas waktu layanan, kendala teknis, atau membandingkan antara wilayah kabupaten/kota untuk memperluas pemahaman terhadap implementasi sertifikat elektronik secara nasional.

DAFTAR PUSAKA

Jurnal

- Abolade, A. O., Dugeri, T., & Adama, J. U. (2018). *Challenges of Digitalizing Land Administration System in Nigeria : The Kaduna State Experience. 2009*, 67–82.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel. *Wood Science and Technology*, 16(4), 293–303. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 154–170.
- Apriana, M. L., & Hamid, A. (2024). *Dampak Sertifikat Elektronik Terhadap Kepercayaan Pelayanan Publik Kepada Layanan Notaris/Ppat Di Kabupaten Kediri*. 8(12), 665–673.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Aprilia, A., & Mubarok, A. (2024). *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik*.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

- Despriyatmoko, G., Syarief, R., & Maulana, A. (2016). Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.2.172>
- Elora, D. (2024). *Problematika Pelaksanaan Ailih Media Sertifikat Menjadi Sertifikat Elektronik*. 2(3), 762–773.
- Hermawan, W., Hakim, D. B., & Hutagaol, M. P. (2016). *Analisis kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dalam pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan kabupaten Bogor*. 9(1), 65–75.
- Hilmi, S. I. (2025). *Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Elektronik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum*. 2(1).
- Japar, M., Riyanto, S., Fahrurrobin, M., & Hermanto. (2024). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 81–90. <https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43502>
- Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor - Google Maps.* (n.d.). Diambil 8 Juli 2025, dari https://www.google.com/maps/place/Kementerian+ATR%2FBPN+Kantor+Pertanahan+Kabupaten+Bogor/@-6.484935,106.8325608,17z/data=!4m8!3m7!1s0x2e69c19314cb24bf:0xe794a489c6e68fde!8m2!3d-6.4846419!4d106.8340521!9m1!1b1!16s%2Fg%2F1pty4c0jm?entry=ttu&g_e=EgoyMDI1MD
- Laksono, R., Laksono, R., Pusat, K., Usaha, T., Teknik, F., & Mada, U. G. (2017). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses. *Diplomatika*, 1(1), 47–60.
- Masri, E. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>

- Maulana, H. S., Rangga, N., Nugraha, A., Mas, R., & Arinda, A. (2024). *Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia*. 1, 1–9.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke Elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat tanah elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(5), 5. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Nafiaty, D. A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Humanika*, 21(2), 151–172. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.29252>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Prasetyo, D. B., & S. (2023). Digitalisasi inovasi layanan pertanahan: Pengecekan sertipikat online di kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Magistra*, 72(1), 17–27.
- Putra. (2024). *Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat*.
- Riky Perdana. (2020). *Catatan Peneliti Tentang Metode Kuantitatif*. <https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang-metode-kuantitatif/>
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi Luncurkan dan Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-luncurkan-dan-serahkan-sertifikat-tanah-elektronik/>
- Sugiyono, P. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In

- Journal GEEJ* (Vol. 7, Nomor 2).
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian*. 2(3), 211–213.
- Surya, I. (2019). *Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor samsat di batoh banda aceh*.
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Zulhakim, A. A. (2024). *Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu*. 196–215.
- Syamsur, S., Madiong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Pada Proses Pendaftaran

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik Versi 1.0